Global Narrative Contestation: Framing Media Internasional Terhadap Isu Pelanggaran Ham di Papua

Juliana Ondi[1*], Roberto Octavianus Cornelis Seba[2], Rendy Hermanto Abraham[3]
[1*,2,3] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia
Corresponding Author's e-mail : anggitaondi89@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4193 - 4202

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3892

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.3892

Article History:

Received: 05-08-2026
Revised: 30-10-2026
Accepted: 30-10-2026

Abstract *: The issue of alleged human rights violations in Papua has attracted the attention of international media and become part of the global human rights discourse. This study analyzes the framing of conflict and human rights issues in Papua by BBC News, Al Jazeera, and The Guardian during the 2019–2025 period using Robert N. Entman's framing model. The findings show that all three media outlets frame Papua as a conflict-affected region with significant humanitarian and human rights impacts. BBC News tends to employ a human rights frame, Al Jazeera emphasizes a humanitarian conflict frame, while The Guardian presents a more critical framing of alleged human rights violations. This study concludes that international media framing contributes to shaping global perceptions of Papua and Indonesia's legitimacy within international human rights norms.*
Keywords *: Papua; Human Rights; Media Framing; Indonesia's Legitimacy; Constructivism.*

Abstrak : Isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua telah menjadi perhatian media internasional dan bagian dari diskursus HAM global. Penelitian ini menganalisis framing BBC News, Al Jazeera, dan The Guardian terhadap isu konflik dan HAM di Papua periode 2019–2025 menggunakan model framing Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga media membingkai Papua sebagai wilayah konflik dengan dampak kemanusiaan dan HAM yang signifikan. BBC News cenderung menggunakan human rights frame, Al Jazeera menonjolkan humanitarian conflict frame, sedangkan The Guardian menampilkan framing yang lebih kritis terhadap dugaan pelanggaran HAM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa framing media internasional berkontribusi dalam membentuk persepsi global mengenai Papua dan legitimasi Indonesia dalam norma HAM internasional.

Kata Kunci : Papua; HAM; Framing Media; Legitimasi Indonesia; Konstruktivisme.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi norma penting dalam tatanan internasional modern. Sejak diadopsinya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, kepatuhan terhadap norma HAM menjadi indikator legitimasi dan reputasi suatu negara di mata komunitas internasional. Negara yang dianggap menghormati HAM memperoleh legitimasi dan kepercayaan, sementara tuduhan pelanggaran HAM dapat menimbulkan kritik internasional dan tekanan diplomatik. Dalam perkembangan kontemporer,

penyebaran dan interpretasi norma HAM tidak hanya berlangsung melalui institusi internasional, tetapi juga melalui ruang publik global yang banyak dipengaruhi oleh pemberitaan media internasional.

Konstruktivisme menekankan bahwa identitas, kepentingan, dan perilaku negara dibentuk melalui interaksi sosial yang sarat dengan makna dan norma. Wendt (1992) menegaskan bahwa struktur internasional tidak hanya terdiri atas distribusi kapabilitas material, tetapi juga struktur ideasional yang membentuk cara negara memahami diri dan pihak lain; anarki internasional tidak otomatis menghasilkan konflik, karena maknanya bergantung pada bagaimana negara memaknai dan mempraktikkannya dalam interaksi sosial. Finnemore dan Sikkink (1998) menjelaskan bahwa norma berkembang melalui tiga tahap, yaitu kemunculan norma (norm emergence), penyebaran norma (norm cascade), dan internalisasi norma (norm internalization). Media internasional sering menjadi saluran penting dalam proses norm cascade karena pemberitaannya memperluas perhatian global terhadap suatu isu dan membentuk persepsi publik internasional.

Perkembangan norma HAM juga berkaitan dengan pendekatan human security yang menempatkan individu, bukan hanya negara, sebagai pusat perhatian keamanan global (UNDP, 1994). Edwards dan Ferstman (2010) menambahkan bahwa pendekatan ini memperluas perhatian komunitas internasional terhadap kelompok rentan, termasuk minoritas dan pengungsi, sehingga konflik yang berdampak pada masyarakat sipil menjadi perhatian penting dalam diskursus keamanan global. Salah satu isu yang secara konsisten muncul dalam diskursus HAM internasional adalah situasi konflik dan keamanan di Papua, Indonesia, yang memiliki sejarah panjang konflik politik, tuntutan identitas, dan dinamika keamanan yang kompleks.

Gelombang protes yang muncul sejak 2019, dipicu oleh kasus diskriminasi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, memunculkan demonstrasi besar, kerusuhan, dan kebijakan pembatasan akses internet oleh pemerintah, yang kemudian menuai kritik terkait kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Dinamika di Papua tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan domestik semata: dalam era globalisasi informasi, peristiwa lokal dapat dengan cepat menjadi perhatian internasional melalui pemberitaan media global dan advokasi organisasi HAM. Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 113 peristiwa terkait HAM di Papua, termasuk 61 korban meninggal dan beberapa kasus penyanderaan warga sipil, sementara konflik bersenjata yang berkepanjangan telah menyebabkan lebih dari 100.000 orang menjadi pengungsi internal sejak 2019 (Amnesty International, 2024). Perhatian global terhadap situasi Papua juga muncul melalui berbagai forum internasional; negara-negara Pasifik Selatan seperti Vanuatu secara konsisten menyoroti isu ini dalam Sidang Umum PBB dan menyerukan akses independen bagi Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB.

Dalam proses tersebut, media internasional memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana isu Papua direpresentasikan kepada audiens global melalui pemilihan isu, penekanan aktor tertentu, serta cara menjelaskan penyebab dan solusi konflik. BBC News, Al Jazeera, dan The Guardian dipilih sebagai objek penelitian karena ketiganya memiliki jangkauan audiens internasional yang luas dan dikenal aktif mengangkat isu konflik, politik internasional, dan hak asasi manusia, meskipun berasal dari latar kelembagaan dan editorial yang berbeda.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media internasional cenderung memiliki framing yang berbeda dalam meliput konflik global, sebagaimana ditemukan pada perbandingan framing Al Jazeera, CNN, dan Global Times terhadap konflik Palestina–Israel (Ibrar & Khan, 2025), framing CNN dan Al Jazeera terhadap perang dagang Amerika Serikat–Tiongkok (Saputra & Surur, 2025), serta perbandingan framing media Barat dan Rusia terhadap krisis Ukraina (Liu, 2019). Studi-studi tersebut menegaskan bahwa latar belakang ideologis dan kepentingan editorial memengaruhi cara media membingkai aktor, penyebab, dan solusi suatu konflik. Meskipun

demikian, kajian yang secara khusus membandingkan framing beberapa media internasional terhadap isu Papua dalam perspektif HAM masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana framing pemberitaan isu dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam media internasional BBC News, Al Jazeera, dan The Guardian pada periode 2019–2025; dan (2) bagaimana framing tersebut berkontribusi dalam membentuk konstruksi diskursus global mengenai legitimasi Indonesia dalam norma HAM internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi isu Papua oleh ketiga media tersebut serta memahami peran media internasional sebagai bagian dari struktur diskursif yang memengaruhi konstruksi identitas dan reputasi negara dalam sistem internasional. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian Hubungan Internasional dalam pendekatan konstruktivisme, khususnya mengenai peran media sebagai aktor non-negara dalam konstruksi makna global; secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik mengenai hubungan antara media internasional, konstruksi diskursus, dan politik legitimasi negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami konstruksi makna dalam teks pemberitaan media internasional, bukan untuk mengukur variabel secara statistik. Metode analisis yang digunakan adalah analisis framing model Robert N. Entman (1993), yang melihat bagaimana suatu peristiwa dikonstruksi melalui empat elemen, yaitu define problems (pendefinisian masalah), diagnose causes (identifikasi penyebab), make moral judgment (penilaian moral), dan treatment recommendation (rekomendasi penyelesaian).

Unit amatan penelitian ini adalah teks berita yang dipublikasikan oleh BBC News, Al Jazeera, dan The Guardian versi internasional berbahasa Inggris mengenai isu dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam rentang waktu 2019–2025, meliputi artikel berita, laporan investigatif, maupun feature news. Unit analisisnya adalah keempat elemen framing Entman pada masing-masing artikel, yang kemudian dibandingkan antar media untuk melihat perbedaan sudut pandang, representasi aktor, dan penekanan isu.

Data primer penelitian berupa teks pemberitaan dari ketiga media tersebut, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dan dokumen resmi yang relevan dengan isu HAM, media internasional, dan konflik Papua. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap artikel berita yang dipublikasikan secara daring. Analisis data dilakukan dengan menyeleksi artikel yang relevan, mengidentifikasi keempat elemen framing pada tiap artikel, membandingkan pola framing antar media, dan menginterpretasikan hasilnya melalui perspektif konstruktivisme untuk menjelaskan kontribusi framing media terhadap konstruksi diskursus HAM global mengenai Papua. Penelitian ini dibatasi pada artikel berbahasa Inggris periode 2019–2025 yang secara eksplisit membahas dugaan pelanggaran HAM di Papua, serta tidak bertujuan memverifikasi kebenaran faktual peristiwa yang diberitakan, melainkan menganalisis konstruksi wacana yang muncul dalam teks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhatian internasional terhadap isu Papua meningkat signifikan selama periode 2019–2025. Momentum pentingnya adalah insiden rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019, yang memicu gelombang demonstrasi dan mendorong isu Papua semakin sering dibahas dalam konteks HAM dan perlindungan kelompok minoritas. Konflik bersenjata yang

berlanjut di wilayah seperti Nduga, Intan Jaya, Puncak, Maybrat, dan Paniai turut menghasilkan pengungsian dalam jumlah besar serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar, yang memperkuat pandangan bahwa isu Papua bukan sekadar persoalan keamanan domestik, melainkan juga krisis kemanusiaan. Perhatian tersebut diperkuat oleh laporan organisasi HAM dan mekanisme HAM PBB, termasuk kunjungan Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat, serta oleh sejumlah negara Pasifik seperti Vanuatu, Solomon Islands, Tuvalu, Nauru, Marshall Islands, dan Tonga yang secara konsisten mengangkat isu Papua dalam forum internasional, sementara Pemerintah Indonesia menegaskan Papua sebagai bagian sah NKRI dan menolak intervensi terhadap urusan domestiknya. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya pemberitaan mengenai Papua di berbagai media internasional, termasuk BBC News, Al Jazeera, dan The Guardian, yang menjadi objek analisis framing dalam penelitian ini.

Framing BBC News terhadap Isu Konflik dan HAM di Papua

Analisis terhadap empat artikel BBC News menunjukkan bahwa media ini secara konsisten membingkai Papua sebagai wilayah konflik berkepanjangan yang berimplikasi pada krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM, dengan masyarakat sipil diposisikan sebagai kelompok paling rentan. Secara umum, BBC News menunjukkan kecenderungan human rights frame yang menempatkan dampak konflik terhadap masyarakat sipil sebagai fokus utama pemberitaan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Framing BBC News terhadap Isu Konflik dan HAM di Papua

No	Define Problems	Diagnose Causes	Moral Judgment	Treatment Recommendation
1	Kekerasan di Papua Barat pada September 2019 yang menewaskan puluhan orang dan memperburuk situasi keamanan.	Rasisme terhadap mahasiswa Papua, protes yang meluas, konflik berkepanjangan, dan bentrokan antara aparat dan warga.	Keprihatinan terhadap korban sipil dan kritik terhadap penggunaan kekuatan oleh aparat.	Dialog, pengurangan kekerasan, dan penyelesaian akar konflik.
2	Penculikan pilot Susi Air oleh kelompok bersenjata serta eskalasi konflik di Papua Barat.	Konflik berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dan kelompok pro-kemerdekaan serta sejarah integrasi Papua yang masih diperdebatkan.	Situasi dipandang serius dengan dampak kemanusiaan dan kritik terhadap eskalasi kekerasan.	Penyelesaian melalui dialog, pengurangan kekerasan, dan perhatian terhadap isu HAM.
3	Dugaan penyiksaan warga sipil oleh prajurit TNI dalam operasi militer di Puncak, Papua.	Kesalahan prosedur aparat, dugaan salah sasaran terhadap warga sipil, dan konflik bersenjata	Tindakan kekerasan dinilai sebagai pelanggaran HAM serius dan menuai kecaman terhadap	Penegakan hukum terhadap pelaku, evaluasi operasi militer, dan

No	Define Problems	Diagnose Causes	Moral Judgment	Treatment Recommendation
		yang berkepanjangan.	praktik aparat di lapangan.	perlindungan warga sipil.
4	Krisis pengungsian massal dan memburuknya kondisi kemanusiaan di Puncak Papua akibat konflik bersenjata.	Eskalasi konflik TNI–TPNPB, operasi militer, dan ketidakseimbangan keamanan yang memicu pengungsian warga.	Kritik terhadap krisis kemanusiaan berupa kelaparan, kematian, dan hilangnya akses layanan dasar.	Perlindungan warga sipil, penanganan kemanusiaan, dan pengurangan operasi militer.

Sumber : *Diolah penulis berdasarkan empat artikel BBC News periode 2019–2025.*

BBC mendefinisikan masalah utama di Papua sebagai konflik berkepanjangan yang menghasilkan kekerasan, instabilitas keamanan, dan krisis kemanusiaan yang saling berkaitan. Penyebab konflik diidentifikasi sebagai kombinasi faktor historis (integrasi Papua yang masih diperdebatkan), politik, dan keamanan, termasuk keberadaan kelompok separatis bersenjata dan operasi militer pemerintah. Dalam penilaian moral, BBC menempatkan warga sipil sebagai korban utama dan menyoroti tindakan aparat sebagai dugaan pelanggaran HAM, sementara rekomendasi penyelesaian yang ditawarkan berorientasi pada dialog, perlindungan warga sipil, dan penanganan akar konflik, bukan semata pendekatan keamanan.

Framing Al Jazeera terhadap Isu Konflik dan HAM di Papua

Al Jazeera secara konsisten membingkai Papua sebagai bagian dari konflik struktural berkepanjangan yang menghasilkan krisis kemanusiaan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2. Secara umum, framing Al Jazeera didominasi oleh perspektif humanitarian conflict frame yang menempatkan dampak terhadap masyarakat sipil sebagai penekanan utama.

Tabel 2. Hasil Analisis Framing Al Jazeera terhadap Isu Konflik dan HAM di Papua

No	Define Problems	Diagnose Causes	Moral Judgment	Treatment Recommendation
1	Kekerasan besar dalam protes Papua Barat yang menewaskan puluhan orang.	Dipicu penyebaran hoaks/isu rasisme serta ketegangan antara warga, aparat, dan kelompok separatis.	Situasi digambarkan kompleks dengan korban sipil dan klaim yang saling bertentangan antar pihak.	Imbauan agar pemerintah menenangkan situasi dan mencegah penyebaran hoaks.
2	Serangan kelompok bersenjata terhadap pasukan Indonesia dalam operasi pencarian pilot yang diculik.	Konflik bersenjata berkepanjangan antara TNI dan kelompok separatis di wilayah pedalaman Papua.	Menampilkan dua versi klaim (militer vs. kelompok separatis) serta menyoroti dugaan pelanggaran HAM.	Mengarah pada perlunya penyelesaian konflik dan pengurangan kekerasan.

No	Define Problems	Diagnose Causes	Moral Judgment	Treatment Recommendation
3	Pembunuhan dan mutilasi warga sipil oleh anggota TNI di Papua.	Konflik bersenjata berkepanjangan dan keterlibatan aparat militer dalam operasi keamanan di wilayah Papua.	Menyoroti pelanggaran HAM serius serta proses hukum terhadap pelaku dari pihak militer.	Penegakan hukum dan akuntabilitas terhadap pelaku pelanggaran HAM.
4	Dugaan pelanggaran HAM berat di Papua dan sikap Amerika Serikat yang dinilai abai.	Dukungan militer Amerika Serikat terhadap Indonesia serta pendekatan keamanan yang diterapkan di Papua.	Kritik keras terhadap militer Indonesia dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.	Penghentian dukungan militer dan dorongan tekanan internasional terhadap isu HAM.

***Sumber** : Diolah penulis berdasarkan empat artikel Al Jazeera periode 2019–2023.*

Al Jazeera mengidentifikasi penyebab konflik secara multidimensi, mencakup faktor historis integrasi Papua, keberadaan kelompok separatis bersenjata, dan pendekatan keamanan pemerintah Indonesia yang dinilai turut memperpanjang siklus kekerasan. Dalam penilaian moral, media ini menonjolkan dampak empiris terhadap masyarakat sipil dibandingkan mempertentangkan klaim pemerintah dan kelompok separatis, sementara rekomendasi penyelesaiannya bersifat non-militeristik, termasuk dorongan perhatian komunitas internasional terhadap isu HAM di Papua.

Framing The Guardian terhadap Isu Konflik dan HAM di Papua

The Guardian menunjukkan framing yang paling kritis di antara ketiga media, dengan secara konsisten menyoroti tindakan represif aparat keamanan, kriminalisasi aktivis, dan pembatasan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari pelanggaran HAM yang bersifat sistemik, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis Framing The Guardian terhadap Isu Konflik dan HAM di Papua

No	Define Problems	Diagnose Causes	Moral Judgment	Treatment Recommendation
1	Dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat, termasuk kekerasan aparat dan penangkapan massal.	Konflik berkepanjangan antara Indonesia dan kelompok pro-kemerdekaan, militerisasi, serta penolakan pemerintah terhadap keterlibatan internasional.	Situasi digambarkan sebagai krisis HAM serius dengan penekanan pada korban sipil dan represi.	Desakan investigasi PBB, dialog internasional, dan transparansi pemerintah Indonesia.

No	Define Problems	Diagnose Causes	Moral Judgment	Treatment Recommendation
2	Kriminalisasi aktivis Papua melalui vonis pengkhianatan terhadap peserta protes anti-rasisme.	Respons negara terhadap demonstrasi yang dikaitkan dengan gerakan kemerdekaan serta ketegangan historis Papua–Indonesia.	Kritik terhadap penggunaan pasal pengkhianatan untuk aksi protes damai, dinilai sebagai pembungkaman kebebasan berekspresi.	Pembebasan tahanan politik dan penghentian kriminalisasi aktivis.
3	Eskalasi konflik bersenjata di Papua Barat yang menyebabkan pengungsian massal dan penargetan jurnalis.	Peningkatan operasi militer, konflik dengan TPNPB, serta kebijakan keamanan represif termasuk penetapan kelompok bersenjata sebagai teroris.	Kekerasan dinilai menciptakan kondisi seperti zona perang bagi warga sipil.	Penghentian kekerasan militer, perlindungan warga sipil dan jurnalis, serta investigasi independen.
4	Kekerasan terhadap anak dan warga sipil di Papua Barat, termasuk dugaan penyiksaan.	Operasi militer Indonesia dan konflik bersenjata berkelanjutan antara TNI dan TPNPB.	Kritik kuat terhadap militer atas dugaan pelanggaran HAM berat terhadap warga sipil.	Penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, serta akses bagi pemantau HAM dan jurnalis.

***Sumber** : Diolah penulis berdasarkan empat artikel The Guardian periode 2019–2023.*

The Guardian mengaitkan akar masalah Papua dengan pendekatan keamanan (security approach) yang dominan digunakan pemerintah Indonesia, serta penolakan akses investigasi internasional yang dinilai memperlemah transparansi dan akuntabilitas. Penilaian moralnya konsisten kritis terhadap aparat negara, menggunakan istilah seperti "zona perang" dan "luka HAM yang membusuk" untuk menegaskan urgensi persoalan, dengan korban sipil, aktivis, jurnalis, dan anak-anak diposisikan sebagai pihak paling terdampak. Rekomendasi penyelesaiannya secara eksplisit menuntut investigasi independen PBB, perlindungan aktivis dan jurnalis, serta peningkatan transparansi pemerintah Indonesia.

Perbandingan dan Konstruksi Diskursus HAM Papua

Ketiga media menunjukkan persamaan mendasar dalam membingkai Papua sebagai wilayah konflik berkepanjangan yang berdampak pada krisis kemanusiaan, dengan masyarakat sipil sebagai kelompok paling rentan, serta sama-sama mendorong penyelesaian melalui pendekatan non-kekerasan dan penghormatan HAM. Namun demikian, terdapat perbedaan penekanan: BBC News cenderung moderat dan berimbang dengan menonjolkan kompleksitas faktor historis, politik, dan keamanan; Al Jazeera lebih menekankan dampak kemanusiaan sekaligus kritik terhadap pendekatan keamanan pemerintah Indonesia; sementara The Guardian

paling tegas memosisikan negara sebagai aktor yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dan secara eksplisit menuntut keterlibatan aktor internasional seperti PBB.

Perbedaan penekanan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kontestasi narasi (narrative contestation) sebagaimana dijelaskan oleh Miskimmon, O'Loughlin, dan Roselle (2013), yaitu kondisi ketika berbagai narasi bersaing untuk membentuk pemahaman publik mengenai suatu peristiwa. Meskipun demikian, kontestasi ini berlangsung dalam batas-batas tertentu karena ketiga media tetap berbagi kerangka besar yang sama, yaitu memandang Papua sebagai isu konflik, HAM, dan kemanusiaan yang saling terkait. Dominasi narasi HAM dalam pemberitaan ketiga media menunjukkan kuatnya norma HAM sebagai standar evaluatif terhadap tindakan negara dalam sistem internasional (Donnelly, 2013), sekaligus menegaskan peran media internasional sebagai aktor non-negara yang turut membentuk agenda dan persepsi publik global (McCombs & Shaw, 1972).

Dalam perspektif konstruktivisme, realitas politik internasional tidak dibentuk semata oleh kekuatan material, melainkan juga oleh ide, norma, dan praktik diskursif (Wendt, 1999). Framing yang dibangun BBC News, Al Jazeera, dan The Guardian berkontribusi dalam mengonstruksikan Papua sebagai bagian dari diskursus internasional mengenai perlindungan HAM, bukan semata persoalan domestik Indonesia. Sorotan berulang terhadap isu HAM, transparansi, dan akuntabilitas berpotensi menghasilkan tekanan normatif (Finnemore & Sikkink, 1998) yang memengaruhi persepsi internasional terhadap komitmen dan legitimasi Indonesia dalam norma HAM global.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa BBC News, Al Jazeera, dan The Guardian sama-sama membingkai Papua sebagai wilayah konflik berkepanjangan yang menimbulkan persoalan HAM dan kemanusiaan, dengan masyarakat sipil sebagai kelompok paling terdampak, serta sama-sama mendorong penyelesaian melalui pendekatan non-kekerasan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan penekanan framing: BBC News relatif moderat dan berimbang, Al Jazeera lebih menekankan dampak kemanusiaan disertai kritik terhadap pendekatan keamanan, sedangkan The Guardian menampilkan framing paling kritis dengan menuntut akuntabilitas negara dan keterlibatan komunitas internasional. Dalam perspektif konstruktivisme, temuan ini menegaskan bahwa media internasional berperan sebagai aktor yang turut membentuk konstruksi diskursus global mengenai Papua, sehingga isu ini tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan domestik, melainkan bagian dari diskursus internasional mengenai perlindungan HAM yang berimplikasi pada legitimasi Indonesia di mata komunitas global.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar: (1) Pemerintah Indonesia memperkuat upaya perlindungan HAM dan mendorong penyelesaian konflik Papua melalui pendekatan yang lebih dialogis dan inklusif guna meningkatkan kepercayaan internasional; (2) media internasional tetap menerapkan prinsip pemberitaan yang berimbang dengan menghadirkan berbagai perspektif yang relevan dalam peliputan isu Papua; dan (3) penelitian selanjutnya memperluas objek kajian dengan membandingkan media internasional dan media nasional, atau menggunakan pendekatan analisis wacana kritis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konstruksi narasi Papua dalam ruang publik global.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana, serta kepada dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan masukan baik moril maupun materiel selama proses penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International. (2024). Laporan situasi hak asasi manusia di Papua tahun 2024. Amnesty International.

BBC News Indonesia. (2019, September 24). West Papua: Day of violence sees at least 27 dead. BBC News.

BBC News Indonesia. (2023, April 18). New Zealand pilot kidnapping: Indonesia's West Papua conflict explained. BBC News.

BBC News Indonesia. (2024, April 1). Menelusuri kasus penyiksaan warga sipil oleh prajurit TNI di Puncak, Papua – 'Kami bebas melakukan apapun yang kami suka'. BBC News.

BBC News Indonesia. (2025, Juli 25). Kondisi warga Puncak, Papua, 'semakin buruk' akibat konflik bersenjata: Ribuan mengungsi, beberapa tewas karena sakit dan diduga ditembak. BBC News.

Donnelly, J. (2013). Universal human rights in theory and practice (3rd ed.). Cornell University Press.

Edwards, A., & Ferstman, C. (2010). Human security and non-citizens: Law, policy and international affairs. Cambridge University Press.

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51–58.

Entman, R. M. (2004). Projections of power: Framing news, public opinion, and U.S. foreign policy. University of Chicago Press.

Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. International Organization, 52(4), 887–917.

Ibrar, Z., & Khan, M. (2025). Framing and media bias in conflict reporting: A comparative analysis of Al-Jazeera, CNN, and Global Times during the 2023 Palestine–Israel conflict. Interdisciplinary Media and Communication Studies, 2(3), 42–71.

Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics. Cornell University Press.

Liu, Z. (2019). News framing of the Ukraine crisis in the Russian and British media: Comparing The Moscow Times and The Guardian. Networking Knowledge, 12(1), 4–22.

McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176–187.

Miskimmon, A., O'Loughlin, B., & Roselle, L. (2013). Strategic narratives: Communication power and the new world order. Routledge.

Saputra, S. A., & Surur, M. (2025). The framing power in CNN and Al-Jazeera's U.S.–China trade coverage: Robert Entman's framing framework. Jurnal Komunikasi, 4(1), 1–18.

The Guardian. (2019, Agustus 6). West Papua: Pacific leaders urge UN visit to region's 'festering human rights sore'. The Guardian.

The Guardian. (2020, Juni 17). Seven Papuan activists convicted of treason after anti-racism protests. The Guardian.

The Guardian. (2021, Mei 11). 'We are living in a war zone': Violence flares in West Papua as villagers forced to flee. The Guardian.

The Guardian. (2023, September 25). 'The kids had all been tortured': Indonesian military accused of targeting children in West Papua. The Guardian.

United Nations Development Programme. (1994). Human development report 1994: New dimensions of human security. Oxford University Press.

Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. International Organization, 46(2), 391–425.

Wendt, A. (1999). Social theory of international politics. Cambridge University Press.
Zahidi, M. S., & Othman, M. F. B. (2024). Human rights issue in Papua: A systematic literature review. UNISCI Journal, 22(65).